

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa**

##### **1. Definisi Aliran Kepercayaan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kepercayaan diartikan sebagai keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Kata kepercayaan ini juga bisa berarti pengakuan terhadap kebenaran apa yang diceritakan/disampaikan oleh orang mengenai suatu kejadian atau keadaan. Sebagai sebuah proses, maka kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat diartikan sebagai suatu pengakuan terhadap suatu kebenaran ajaran yang dibawa seseorang ‘penerima wahyu’ dari Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Sedangkan kata kepercayaan yang dimaksud di sini merujuk pada ajaran pandangan hidup berkepercayaan kepada Tuhan YME yang tidak bersandarkan sepenuhnya kepada ajaran agama-agama yang diakui pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, dalam kehidupan moralnya maupun dalam rangka menyembah kepada Tuhan penganut paham aliran kepercayaan tidak berpegang ataupun tidak menganut pada suatu ajaran agama tertentu.<sup>2</sup>

Menurut Mulder, kata kepercayaan dipakai untuk menyebut gerakan-gerakan mistisme kejawen. Istilah kejawen dapat diartikan juga sebagai

---

<sup>1</sup> Todung M. Lubis, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 65

<sup>2</sup> Eko Rusadi, *Ugasan Torop Dalam...*, hlm. 2

ilmu kebatinan Jawa. Menurut Wongsonegoro, kebatinan merupakan bentuk kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Esa menuju tercapainya budi luhur dan kesempurnaan hidup. Kebatinan di Indonesia, dalam praktiknya dapat berupa tasawuf, ilmu kesempurnaan, theosofi, dan mistik. Di dalamnya tetap mengembangkan aspek *inner reality*, kenyataan rohani.<sup>3</sup>

Nama kebatinan dikenal sekitar tahun 1950-an sampai dengan 1960-an yang muncul dalam berbagai bentuk gerakan atau perguruan kebatinan. Masing-masing perguruan dipimpin oleh guru kebatinan yang mengajarkan ilmunya pada pengikut-pengikutnya. Ilmu yang diajarkan, pada umumnya menurut pengakuan para guru itu diperoleh atas dasar wahyu atau wangsit dari Tuhan.<sup>4</sup>

Konsep kebatinan yang berkembang di Jawa, menurut Howell memiliki akar yang berasal dari gerakan sufisme Islam yang pada saat itu tumbuh dan berkembang di Asia Tenggara pada abad ke 16. Gerakan sufisme Islam ini masih berkembang hingga abad ke 20 bersamaan dengan perkembangan modernisme Islam. Gerakan sufisme Islam ini dikenal lewat ekspresi keagamaannya yang membedakan sesuatu yang bersifat lahir dan batin. Jadi dalam mendefinisikan kebatinan Jawa, kita dapat menerjemahkan kebatinan menjadi “ilmu batin”, mistisisme, atau ilmu Jawa.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Rahmat Subagya, *Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1976), hlm. 21

<sup>4</sup> IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 21

<sup>5</sup> Arman Riyansyah, *Ekslusi Hak-hak Sipil...*, hlm. 64

Menurut Mulder, kebatinan dinilai sebagai inti dari kebudayaan Jawa yang menjelaskan bagaimana orang Jawa menjalankan hidupnya. Kebatinan adalah mistisme, pengetahuan mengenai jagad semesta yang bertujuan meningkatkan hubungan individu secara langsung dengan jagad yang lebih besar yaitu Tuhan. Praktik kebatinan adalah realitas tertinggi; sebagai sebuah cabang pengetahuan yang mempelajari tempat manusia di dunia ini dan alam semesta yang didasarkan atas ketunggalan Sejati.<sup>6</sup>

Senada dengan penjelasan di atas, Sumatri Mertodipuro sebagaimana dikutip oleh Rahmat Subagya menyebutkan bahwa kebatinan adalah jalan bagi orang Indonesia dalam menggapai kebahagiaan. Di Indonesia, kebatinan, apapun sebutannya---tasawuf (mistisme Islam), ilmu kesempurnaan, teosofi atau mistisme---adalah fenomena lumrah. Kebatinan mengembangkan realitas dalam, realitas spiritual. Oleh karena itu, sejauh orang Indonesia masih orang Indonesia sejati, dikuasai oleh jati diri asli mereka, kebatinan akan tetap ada di Indonesia, entah itu di dalam agama-agama resmi atau di luarnya.<sup>7</sup>

Mengenai pergesaran kosa kata dari mistisme kejawaen menjadi kepercayaan, Mulder menjelaskan sebagai berikut:

hingga tahun enam puluhan, kata kebatinan dipersamakan dengan mistisisme Jawa. Tetapi tampaknya tidak semua orang menyukai persamaan itu. menurut gerakan-gerakan mistik tertentu, Pangestu misalnya, tradisi mistik kejawaen meliputi lebih banyak hal dari sekedar olah batin seseorang untuk menemukan asal-muasal ketuhannya. kebatinan juga membuka hubungan dengan dunia roh, magi, politeisme, dan para ahli mistisisme yang berwawasan modern merasa

---

<sup>6</sup> Niels Mulder, *Mistisme Jawa...*, hlm. 45

<sup>7</sup> Rahmat Subagya, *Kepercayaan...*, hlm. 21

tidak nyaman dengan warisan-warisan kuno itu. Guna membedakan diri, mereka lebih suka menggunakan kata-kata turunan dari gagasan jiwa dan roh. Secara demikian, kebatinan, sebagai "ilmu tentang batin manusia" menjadi sejajar dengan "ilmu jiwa" dan "spiritualitas". Semua itu termasuk dalam kategori kepercayaan. Dari akhir era lima puluhan hingga era tujuh puluhan bisa kita saksikan meningkatnya penekanan pada mistisisme monoteistik. Pada saat yang sama para pimpinan mistik menafsirkan kedudukan konstiusional kepercayaan agar setara dengan agama, dan guna menghindari kesahpahaman sejak saat itu kata kepercayaan dipakai untuk menyebut gerakan-gerakan mistisisme kejawen genarasi sesudahnya.<sup>8</sup>

Jadi, aliran kepercayaan berarti kepercayaan masyarakat Indonesia yang tidak termasuk ke dalam salah satu agama resmi. Aliran kepercayaan dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu: *pertama*, golongan kepercayaan yang animistis tradisional tidak terdapat filosofinya dan tidak ada mistiknya, misal: Kaharingan, kepercayaan suku Dayak di Kalimantan, dan lain-lain. *Kedua*, golongan kepercayaan masyarakat yang ada filosofinya disertai ajaran mistik yang memuat ajaran-ajaran bagaimana caranya agar manusia bisa mendekati diri atau bahkan bisa bersatu dengan Tuhan. Ajarannya selalu membicarakan yang ada sangkut pautnya dengan batin atau hal-hal yang gaib. Karena itu, golongan ini sering disebut dengan golongan kebatinan.<sup>9</sup> Dalam hal ini, Kapribaden termasuk golongan kedua, karena di dalamnya memuat ajaran mistik.

## **2. Sejarah dan Perkembangan Aliran Kepercayaan**

Kebangkitan kebatinan di Jawa berkembang pesat pada sekitar pertengahan abad ke 20, dimana tumbuh dalam sebuah gelombang

---

<sup>8</sup> Niels Mulder, *Mistisme Jawa...*, hlm. 21

<sup>9</sup> Rahmat Subagya, *Kepercayaan...*, hlm. 212-213

kegoncangan masyarakat pada abad ke 19 sampai awal abad ke 20. Oleh karena itu, timbulnya banyak aliran kebatinan itu justru ketika masyarakat Indonesia mengalami kegoncangan karena tekanan jiwa yang meluas dalam waktu yang panjang pada masa penjajahan. Perang, perjuangan fisik merebut kemerdekaan, teror semasa revolusi serta pergolakan-pergolakan yang terjadi di daerah menyebabkan keadaan yang tidak menentu yang berakibat tumbuh suburnya proses polarisasi politik, fanatisme agama, pencarian jiwa dan kegamangan jati diri. Sementara itu, timbulnya gerakan kebatinan itu sendiri merupakan perwujudan kebangkitan kultural “*orang jawa abangan*” dimana orang-orang Jawa dari golongan nasionalis semakin sadar akan jati diri kejawaen sinkretis mereka. Sebagai bentuk sinkretisme secara historis telah berakar di dalam masa yang sangat panjang dan telah diperkaya oleh berbagai unsur agama yang berbeda yang pernah masuk ke Indonesia yaitu Hindu Budha, Islam, dan Kristen, sehingga corak aliran kebatinan itu pun bermacam-macam. Ada yang bercorak animisme, ke-Hindu-an, ke-Islam-an dan mistik.<sup>10</sup>

Ekspansi gerakan kebatinan mulai terlihat di akhir tahun 1948. Pada waktu itu telah diadakan kongres kebudayaan kedua yang dipimpin oleh Wongsonegoro di Magelang. Hasil kongres itu mengusulkan pemerintah membuat lembaga untuk mempraktekan ilmu kebatinan secara luas serta untuk memperkuat dan memperhebat perjuangan batin.

---

<sup>10</sup> Arman Riyansyah, *Ekslusi Hak-hak Sipil...*, hlm. 64.

Tahun-tahun berikutnya, terjadi peningkatan yang ajeg pada gerakan kebatinan. Untuk memantau perkembangan gerakan tersebut, pada tahun 1954, dengan surat keputusan Perdana Menteri RI. Nomor 167/PM/54 tanggal 1 Agustus 1954 pemerintah PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat).<sup>11</sup>

Di kalangan kelompok kebatinan sendiri, pada tahun 1955 dibentuk wadah bernama BKKI (Badan Kongres Kebatnan Indonesia), yang didirikan oleh Wongsonegoro. Dalam Kongres Kebatnan Indonesia I ditetapkan semboyan aliran kebatnan, yaitu “*sepi ing pamrih, rame ing gawe, memayu hayuning bawana*”.<sup>12</sup>

Pada Kongres Kebatnan Indonesia II di Surakarta tahun 1956, dirumuskan definisi kebatnan yaitu: “sumber asas dan sila Ketuhanan Yang maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup”. Kongres Kebatnan Indonesia III pada tanggal 17-20 Juli 1958 di Jakarta, Presiden Sukarno sempat hadir dan memberikan sambutan. Kemudian, pada Kongres Kebatnan Indonesia IV, 22-24 Juli 1960 di Malang, Jawa Timur, menumbuhkan anggapan bahwa antara agama dan kebatnan tidak ada perbedaan prinsip, keduanya sama-sama mengamalkan budi luhur. Selanjutnya pada Kongres Kebatnan Indonesia V, 1-4 Juni 1963 di

---

<sup>11</sup> Ridin Sofwan, *Menguak Seluk Beluk Aliran Kebatnan Indonesia*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1999), hlm. 2

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Ponorogo, Jawa Timur, dirumuskan perlunya terlibat dalam penyelamatan revolusi berdasarkan Pancasila.<sup>13</sup>

Demi memperoleh legalitas dan landasan hukum bagi kebatinan, untuk menjamin keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, pada tanggal 7 sampai 9 November 1970 diadakan simposium Kepercayaan yang berlangsung di Yogyakarta. Dalam forum tersebut Wongsonegoro mengungkapkan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa membuat sebuah sistematisasi muatan ajaran dengan sebutan kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian.<sup>14</sup> Sistematisasi tersebut ia ambil dengan menyoroti kalimat akhir UUD 1945 pasal 29 ayat 2, sehingga dalam hal ini, kedudukan kebatinan dianggap sama dan sejajar dengan agama.

Kemudian pada tanggal 27-30 Desember 1970 diadakan Munas I (Musyawarah Nasional I) di Yogyakarta. Hasil Munas I tersebut adalah terbentuknya organisasi baru yang dinamakan Sekretariat Kerjasama Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (SKK).<sup>15</sup> Organisasi tersebut merupakan wadah baru pengganti BKKI yang menampung aspirasi dari semua penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang tergabung dalam organisasi, kelompok, maupun perorangan. Mulai saat itu, istilah kebatinan diganti dengan kepercayaan, lengkapnya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan di dalamnya tercakup jenis-jenis aliran kebatinan, kejiwaan maupun kerohanian.

---

<sup>13</sup> Mohammad Damami, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973-1978: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagaman di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2001) hlm. 109

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 65

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 111

Upaya mencari landasan hukum selanjutnya makin dimantapkan lagi dalam sidang MPR-RI tahun 1973.<sup>16</sup> Dengan demikian diakuilah kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di samping agama dan sejak itu aliran kebatinan berubah nama menjadi aliran kepercayaan. Pengakuan legalitas ini berbarengan dengan timbulnya keberatan di masyarakat yang merasa resah dengan isu yang menyebar secara nasional bahwa akan dikabulkannya aspirasi penghayat kepercayaan yang akan menjadi agama. Langkah kompromi diambil pemerintah dengan memasukkan urusan penghayat kepercayaan berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, agama formal tetap berada di bawah Departemen Agama. Pada tahun 1978, Presiden Soeharto menegaskan kembali bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian dari kebudayaan dan tidak mengarah kepada pembentukan agama baru. Hal ini kemudian diakomodasi melalui lahirnya keputusan Presiden No. 27 tahun 1978, tentang pembentukan Direktorat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilingkungan Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>17</sup>

## **B. Diskriminasi Agama**

Secara etimologi, diskriminasi berasal dari bahasa latin yaitu *discriminatus* yang artinya membagi atau membedakan. Secara istilah, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-

---

<sup>16</sup> Ridin Sofwan, *Menguak Seluk Beluk...*, hlm. 5

<sup>17</sup> Arman Riyansyah, *Ekslusi Hak-hak Sipil...*, hlm. 69

atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesuku bangsa, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.<sup>18</sup>

Undang-undang RI NO 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan diskriminasi sebagai tindakan pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Dalam literatur lain, Doob sebagaimana dikutip Liliweri menjelaskan bahwa diskriminasi merupakan perilaku yang ditujukan untuk mencegah suatu kelompok, atau membatasi kelompok lain yang berusaha memiliki atau mendapatkan sumber daya. Secara teoritis, diskriminasi dapat dilakukan melalui kebijakan untuk mengurangi, memusnahkan, menaklukkan, memindahkan, melindungi secara legal, menciptakan pluralisme budaya dan mengasimilasi kelompok lain.<sup>19</sup>

Diskriminasi sering didahului dengan prasangka sehingga membuat seseorang atau kelompok membuat perbedaan dengan kelompok lain. Prasangka adalah sikap negatif terhadap seseorang atau kelompok tertentu tanpa dasar alasan yang benar. Prasangka seringkali didasari atas

---

<sup>18</sup> Fulthoni, et. all., *Memahami Diskriminasi*, (Jakarta: ILRC, 2009), hlm. 3

<sup>19</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta, LKiS, 2005), hlm. 218

ketidapkahaman, ketidakpedulian pada kelompok di luar kelompoknya. Prasangka yang berlebihan dapat menyebabkan stigma/*stereotip*. *Stereotip* adalah gambaran masyarakat terhadap suatu hal, biasanya berkonotasi negatif tentang kelompok tertentu. Stigma ini dipelajari seseorang dari pengaruh sosial yang ada disekitarnya. Diskriminasi terjadi ketika prasangka buruk dan stigma tersebut berubah menjadi aksi atau tindakan.<sup>20</sup>

Lebih lanjut, Rose juga menjelaskan bahwa prasangka merupakan sumber dari tindak diskriminasi. Menurutnya diskriminasi merupakan perlakuan berbeda terhadap seseorang dengan melihat asal kelompok atau kategori lainnya. Ia mengklasifikasi beberapa bentuk diskriminasi antara lain: menghina dan menyakiti, menolak keberadaan seseorang atau komunitas, dan penyerangan yang berupa kekerasan.<sup>21</sup>

Diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat biasanya diskriminasi individu dan diskriminasi institusi. Diskriminasi individu adalah tindakan seorang pelaku yang berprasangka. Individu bisa melakukan diskriminasi baik dalam kapasitas pribadi maupun profesional. Sedang diskriminasi institusi merupakan diskriminasi yang tidak ada hubungannya dengan prasangka individu melainkan dampak kebijaksanaan atau praktik berbagai institusi dalam masyarakat.<sup>22</sup> Selain diskriminasi individu dan institusi, diskriminasi juga dibagi menjadi diskriminasi langsung dan tidak langsung. Diskriminasi

---

<sup>20</sup> Fulthoni, et. all., *Memahami Diskriminasi...*, hlm. 5

<sup>21</sup> Naili Ni'matun Illiyun, *Dinamika Kehidupan Kelompok Minoritas di Indonesia (Studi Kasus Pengalaman Bermasyarakat dan Bernegara Warga Kerokhanian Sapta Darma)*, (Yogyakarta: tesis tidak diterbitkan, 2015), hlm. 19

<sup>22</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2004), hlm. 161

Langsung adalah tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum dan sebagainya dan juga terjadi manakala pengambil keputusan diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu. Sedangkan diskriminasi tidak langsung dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi ras/etnik tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok ras/etnik lainnya yang mana aturan dan prosedur yang mereka jalani mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Diskriminasi individu merupakan diskriminasi langsung, sedangkan diskriminasi institusi merupakan diskriminasi tidak langsung.<sup>23</sup>

Diskriminasi yang terjadi di setiap lini kehidupan pada dasarnya tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab diskriminasi itu sendiri. Dalam banyak kasus, diskriminasi terjadi akibat dari latar belakang sejarah, dinamika sosio-kultural, faktor dalam diri (kepribadian) dan adanya perbedaan keyakinan, kepercayaan dan agama. Faktor terakhir inilah yang paling sering menjadi sumber kekerasan yang terjadi di Indonesia.

Agama, jika dikaji secara sosiologis, maka ia memiliki peran ganda. Di satu sisi agama berfungsi sebagai perekat sosial, di sisi lain agama juga berperan sebagai pemicu konflik yang berujung pada kekerasan atau diskriminasi. Konflik adalah suatu “benturan” yang disebabkan oleh perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham atau kepentingan di antara

---

<sup>23</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik...*, hlm. 222

dua pihak atau lebih. Benturan ini dapat berbentuk non fisik, bisa juga berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan ataupun berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan.<sup>24</sup>

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (atau juga kelompok) yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Soerjono Soekanto menyebut konflik sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan, yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Lewis A. Coser berpendapat bahwa konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau menenyapkan lawan.<sup>25</sup>

Konflik lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan ciri badaniah, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan, atau pola-pola perilaku antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks keagamaan, konflik bisa disebabkan karena adanya perbedaan iman dan ritus dalam suatu kelompok agama tertentu. Perbedaan tersebut sering menjadi alasan persaingan, perdebatan, dan berujung pada diskriminasi. Diskriminasi agama adalah perlakuan tidak adil pada seseorang atau kelompok yang dilakukan oleh kelompok lain atas dasar keyakinan. Seseorang atau kelompok dapat mengalami diskriminasi agama

---

<sup>24</sup> Eep Saefulloh Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 46-47

<sup>25</sup> Taufiq Rohman Dhohiri dkk, *Sosiologi (Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 24

karena perbedaan agama yang dianut dan praktek-praktek keagamaan yang dijalankannya. dalam hal ini, penghayat Kapribaden yang berada di dusun Kalianyar juga tak luput dari tindak diskriminasi. Atribut yang mereka sandang sebagai kelompok penghayat kepercayaan mengakibatkan terjadinya proses diskriminasi pada level kultural.

### C. Teori Perlawanan

Dalam buku Zaiyardam Zubir, dijelaskan bahwa perlawanan adalah gerakan/reaksi yang dilakukan kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah- tengah mereka.<sup>26</sup> Gerakan ini dilakukan dalam rangka merubah keadaan pada kondisi sebelumnya, atau menuju kondisi yang baru yang lebih baik.

Senada dengan penjelasan di atas, Hagopian mendefinisikan perlawanan sebagai gerakan suatu organisasi atau sekelompok organisasi yang bermaksud mengadakan perubahan terhadap struktur sosial yang sudah ada sebelumnya. Gerakan perlawanan merupakan perilaku dari sebagian anggota masyarakat untuk mengoreksi kondisi yang banyak menimbulkan problem atau tidak menentu serta memunculkan kehidupan baru yang lebih baik.<sup>27</sup>

Menurut James Scott, perlawanan muncul berbasis pada hubungan dan pertarungan antar kelas, hal tersebut berlaku sebagai tindakan perlawanan perorangan maupun perlawanan kolektif, dan perlawanan kelas ini memuat

---

<sup>26</sup> Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*, Yogyakarta: Insist Press, 2002, hal. 19

<sup>27</sup> Didit Aditia Permana, *Strategi Perlawanan Kelompok Minoritas (Studi Tentang Strategi Perlawanan Aliran Kepercayaan Sapta Darma terhadap Dominasi Negara dan Agama Mayoritas di Yogyakarta)*, (Yogyakarta: tesis tidak diterbitkan, 2014), hlm. 19

tindakan-tindakan yang dilakukan kelas yang lemah yang ditujukan untuk menolak klaim yang dibuat kelas-kelas yang kuat terhadap mereka.<sup>28</sup>

Sementara itu, Ted Robert Gurr membuat penjelasan tentang penyebab munculnya perlawanan dengan mendasarkan pada konsep "perampasan". Menurut Gurr yang menyebabkan orang melakukan perlawanan adalah perampasan. Orang bisa melakukan perlawanan jika ia merasa sesuatu yang diharganya dirampas atau jalan hidupnya terancam oleh sesuatu. Rasa dirampas ini menurut Gurr disebut "*relative deprivation*". Perasaan ini muncul akibat tidak sesuainya keinginan dengan kemampuan mencapai apa yang diinginkan. Kemampuan untuk mencapai keinginan dirasakan ada, tapi upaya mencapainya dihambat atau digagalkan.

Penjelasan Scott dan Gur sejalan dengan konteks kehidupan kelompok penghayat Kapribaden di dusun Kalianyar. hak dan kebebasan para penghayat Kapribaden untuk mengekspresikan keberagaman mereka "dirampas" oleh kelompok mayoritas. Ketidakpuasan mereka terhadap sikap kelompok mayoritas itu lah yang membuat mereka melakukan perlawanan.

Mengenai jenis-jenis perlawanan, Scott membagi menjadi dua bagian, yaitu perlawanan publik atau terbuka dan perlawanan tersembunyi atau tertutup. Perlawanan terbuka argumentasinya bersifat 1) Organik, sistematis dan kooperatif. 2) Berprinsip tidak mementingkan diri sendiri. 3) berkonsekuensi revolusioner. 4) Mencakup gagasan atau maksud-maksud yang meniadakan basis dominasi itu sendiri. Sedangkan perlawanan tertutup

---

<sup>28</sup> James C. Scott, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah (Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlm. 283

argumentasinya bersifat 1) Tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual 2) Bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri (3) Tidak berkonsekuensi revolusioner, 4) Menyiratkan dalam maksud mereka akomodasi terhadap sistem dominasi.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> James C. Scott, *Senjatanya Orang-orang...*, hlm. 385-386